

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 17  
PERATURAN BUPATI WAY KANAN DALAM MENINGKATKAN  
POTENSI WISATA LOKAL  
(Studi Pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata  
Kabupaten Way Kanan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 (Hukum)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh**

**LISA ANISA FRICCHILLIA  
NPM: 1621020508**

**Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2020 M**

**PE ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL  
17 PERATURAN BUPATI WAY KANAN DALAM MENINGKATKAN  
POTENSI WISATA LOKAL  
(Studi Pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata  
Kabupaten Way Kanan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 (Hukum)  
Dalam Ilmu Syari'ah**



Pembimbing I : Dr. H. A. KumediJa'far, S. Ag, MH.  
Pembimbing II : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2020 M**

## ABSTRAK

Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki sumber daya wisata alam yang potensial apabila dikelola dengan baik. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Way Kanan. Pemerintah daerah memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan objek wisata yang ada di Kabupaten Way Kanan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 Pasal 17 Tentang Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Pariwisata.

Berdasarkan masalah diatas, penelitian ini mengambil rumusan masalah yaitu: Bagaimana Implementasi Pasal 17 Peraturan Bupati Way Kanan dalam meningkatkan potensi wisata lokal di Kabupaten Way Kanan? Dan Bagaimana analisis *Fiqh Siyasah* tentang Implementasi Pasal 17 Peraturan Bupati Way Kanan dalam meningkatkan potensi wisata lokal di Kabupaten Way Kanan dan untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Bupati Way Kanan dalam meningkatkan potensi wisata lokal di Kabupaten Way Kanan.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode lapangan (*field research*), yaitu merupakan upaya pengumpulan data secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam melakukan penyusunan, dengan pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang atau masyarakat yang berperilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian pemerintah sudah amanah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Bupati Way Kanan seperti terlaksananya program kerja pelatihan, pengembangan dan promosi objek wisata baik melalui media sosial ataupun media cetak, namun belum maksimal dan belum dilaksanakan dengan efektif, masih terdapat beberapa program kerja yang belum tercapai. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya 3A, yaitu Atraksi (*Attraction*), Mudah dicapai (*Accesibility*), dan Fasilitas (*Amenities*) serta masih adanya keterbatasan anggaran dana yang diperoleh dari pemerintah untuk mengelola wisata lokal yang ada. Serta masih kurangnya kesadaran dari pengunjung untuk menjaga dan melestarikan objek wisata yang sudah ada dan pelaksanaan dari tugas dan fungsi nya sudah sesuai dengan teori *Fiqh Siyasah* yaitu dilakukan dengan amanah, jauh dari kemafsadatan dan menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat setempat ataupun pengunjung lokasi pariwisata serta sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan islam untuk memberikan keamanan dan kedamaian bagi umat islam agar mampu mencapai maksud dan tujuannya

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Lisa Anisa Fricchillia

NPM : 1621020508

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Bupati Way Kanan dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal (Studi Pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 November 2020

Penulis,

Lisa Anisa Fricchillia

NPM. 1621020508





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. ( 0721 ) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP  
IMPLEMENTASI PASAL 17 PERATURAN BUPATI  
WAY KANAN DALAM MENINGKATKAN POTENSI  
WISATA LOKAL (Studi Pada Dinas Pemuda Olahraga  
dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan)**

**Nama : Lisa Anisa Fricchillia**

**NPM : 1621020508**

**Jurusan : Hukum Tatanegara(Siyasah Syar'iyah)**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S. Ag, MH.**

**Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

**NIP.197208262003121002**

**NIP.198802182018011002**

Ketua Jurusan

**Frenki M.Si**

**NIP.198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. ( 0721 ) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 17 PERATURAN BUPATI WAY KANAN DALAM MENINGKATKAN POTENSI WISATA LOKAL (Studi Pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan)”**.

Disusun oleh, **Lisa Anisa Fricchillia**, NPM : 1621020508, program studi **Siyasah Syar’iyyah**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan pada Hari/ Tanggal : **Kamis, 12 November 2020**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Frenki M.Si**

**Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I., M.H**

**Penguji I : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I**

**Penguji II : Dr. H. A. Kumedi Ja’far, S. Ag, MH.**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**



**Dr. H. Khairuddin, M.H**  
**NIP.196210221993031002**



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء : ٥٨)

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Qs. An-Nisa ayat 58)*



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobil'alamin, rasa syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, Shalawat serta salam saya agungkan kepada Baginda Muhammad SAW, karena atas izin dan ridho-Nya yang telah memudahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Kupersembahkan karya kecilku ini kepada:

1. Kedua orangtua ku yang sangat berarti didalam hidupku, untuk Ayah tersayang Tn. Yoyon Wahyono A.M dan untuk ibunda tercinta Ny. Sugiarti, terimakasih atas pengorbanannya yang tiada henti, selalu mendoakan dengan ikhlas, mendidik dan memberikan motivasi yang sangat besar sampai pada saat ini. Semoga kalian senantiasa diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Kepada adik-adik kecilku, semoga kalian bisa berbakti kepada orang tua dan selalu bahagia.
3. Kepada sahabat-sahabat ku dan teman dekatku Dea Indah Monica dan KB (Heni Aprilia, Yus Afrida, Fitra Rinaldi Fasya dan M.Rafirsa Agung Pratama) yang tetap setia menemani sampai tahap ini.
4. Kepada Ervin Noviandi, terimakasih telah menyemangati, memotivasi dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugerahi nama LISA ANISA FRICCHILLIA, dilahirkan pada tanggal 18 April 1998 di kota Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Anak pertama dari tiga bersaudara, merupakan buah hati dari pasangan Bapak Yoyon Wahyono A.M dan Ibu Sugiarti. Adapun riwayat pendidikan peneliti yaitu:

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 09 Bukit Kemuning selesai pada tahun 2010
2. Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 01 Bukit Kemuning selesai pada tahun 2013, dan
3. Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 01 Bukit Kemuning selesai pada tahun 2016
4. Perguruan Tinggi tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) pada tahun 2016.

Bandar Lampung, 12 November 2020

Penulis

Lisa Anisa Fricchillia  
NPM. 1621020508

## KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan terwujudnya karya ilmiah ini yang merupakan upaya penulis secara optimal wujud: “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Bupati Way Kanan dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal (Studi Pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan)” Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, ucapan terimakasih, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya lah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan do’a, mudah-mudahan bantuan yang di berikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Ucapan Terimakasih ini penulis berikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Khairuddin Tahmid M.H selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Frenki M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasah
4. Dr. H. A. Khumedi Ja’far, S.g, MH dan Bapak Hervin Yoki Pradikta M.H.I masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II yang banyak telah meluangkan waktu dan bersabar dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Semua Dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepada pimpinan dan staff karyawan perpustakaan Fakultas Syariah, perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung dan perpustakaan daerah Kota Bandar Lampung yang telah berkenan meminjamkan buku-buku, jurnal dan lain-lain sebagai literature kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mentransfer dan mendidik segala ilmunya dengan penuh ketekunan dan kesabaran.
8. Seluruh pihak di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan Lampung yang menjadi tempat penelitian.
9. Kedua Orang Tua yang sangat aku cintai (Ayah Yoyon Wahyono dan Ibu Sugiarti) yang penulis cintai dan banggakan.

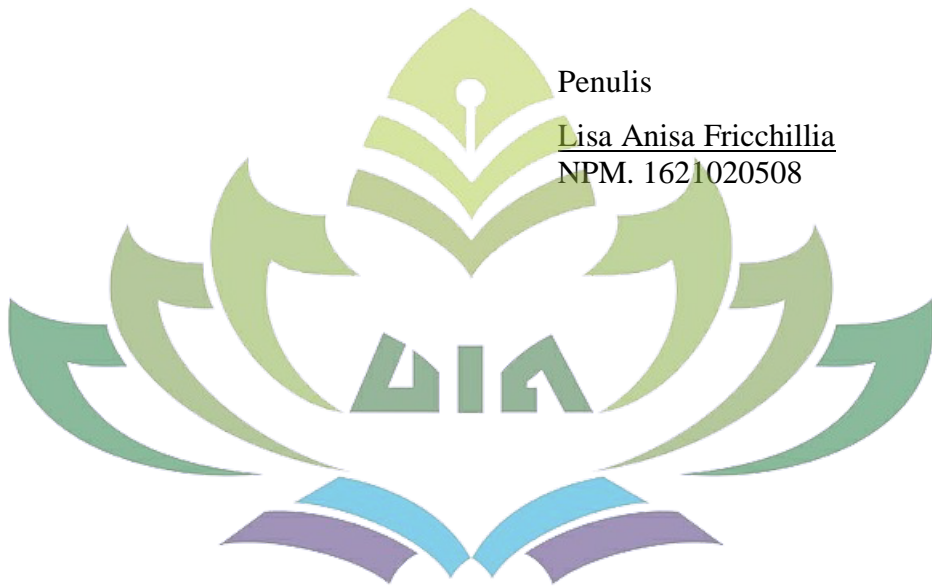
10. Seseorang yang selalu memotivasi, Ervin Noviandi terimakasih telah menyemangatiku sampai saat ini.
11. Teman-temanku jurusan Siyasah kelas G. Terkhusus Yus Afrida, Heni Aprilia, M. Rafirsa Agung Pratama, dan Fitra Rinaldi Fasya.
12. Teman baikkku Dea Indah Monica yang selalu ada saat susah dan senang.
13. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 12 November 2020

Penulis

Lisa Anisa Fricchillia

NPM. 1621020508



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWATAR HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Manfaat Penelitian .....	10
H. Metode Penelitian.....	11

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. KajianTeori .....	18
1. Konsep <i>Fiqh Siyasah</i> .....	18
a. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	18
b. Pengertian Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> .....	24
c. Teori Kepemimpinan .....	26
2. Pengertian Pariwisata .....	19
a. Definisi Pariwisata .....	32
b. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pariwisata .....	36
c. Jenis-jenis Pariwisata .....	40
d. Tujuan dan Fungsi Pariwisata .....	49
e. Objek dan Daya Tarik Pariwisata .....	50
f. Pendapatan Asli Daerah Dalam Pariwisata.....	62
B. Tinjauan Pustaka .....	66

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan .....	72
1. Sejarah Berdirinya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata .....	72



2. Visi dan Misi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.....	78
3. Program Kegiatan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata .....	81
4. Struktur Kepengurusan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata ..	82
B. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Way Kanan dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal.....	85

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Implementasi Pasal 17 Peraturan Bupati dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal di Kabupaten Way Kanan .....	98
B. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Bupati dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal di Kabupaten Way Kanan.....	103

#### **BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

A. Kesimpulan .....	107
B. Rekomendasi.....	108

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan dari penelitian ini, terlebih dahulu akan diberikan penjelasan dan penegasan judul dari Skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Bupati Way Kanan dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal (Studi Pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan)”. Berangkat dari judul diatas maka perlu ditemukan istilah-istilah penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca, sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap peristiwa yang berupa suatu (karangan, perbuatan) dan sebagainya untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya (sebab, musabab, peristiwa dan perkaranya).<sup>1</sup>
2. Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang mengatur tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>2</sup>
3. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.<sup>3</sup>
4. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan daya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Poewadariminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia PN (Jakarta: balai pustaka, 1997), h.39

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia, 2014), h.4.

<sup>3</sup> Imron, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta, Karya Ilmu: 1992), h. 78.

5. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata<sup>5</sup>.
6. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Berdasarkan penegasan judul tersebut dapat diperjelas bahwa penelitian ini adalah sebuah penelitian untuk menganalisis secara lebih mendalam terhadap implementasi pasal 17 Peraturan Bupati tentang tugas dan fungsi pemerintah daerah yaitu Kepala Dinas Pariwisata dalam meningkatkan potensi wisata lokal di Kabupaten Way Kanan.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

Penelitian terhadap Analisis Fiqh Siyasah terhadap Implementasi pasal 17 Peraturan Bupati dalam meningkatkan potensi wisata lokal di Kabupaten Way Kanan, dimana Kabupaten Way Kanan memiliki potensi wisata alam yang sangat menarik apabila dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik. Penelitian meninjau terhadap Analisis Fiqh Siyasah terhadap Implementasi pasal 17 peraturan bupati way kanan yaitu mengenai tugas dan fungsi kepala

---

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h.1096.

<sup>5</sup> Nyoman S Pendit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999), h.16.

bidang pariwisata dalam meningkatkan potensi wisata lokal di Kabupaten Way Kanan.

2. Alasan subjektif

- a. Pokok pembahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah jurusan siyasah.
- b. Bahan-bahan penunjang yang dibutuhkan tersedia di perpustakaan.
- c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan yang dibahas diatas.

**C. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT telah menganugerahkan Bangsa Indonesia dengan kekayaan yang melimpah. Keanekaragaman suku dan budaya, keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang merupakan sumber daya dan merupakan salah satu unsur pendukung utama bagi kelangsungan hidup dan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Pariwisata dikenal dalam istilah bahasa arab dengan kata "*al-siyahah, al-rihlah, dan al-safar*"<sup>6</sup> atau dalam bahasa inggris dikenal dengan "*tourism*"<sup>7</sup>. Dalam kitab Al-Quran maupun sunnah terdapat ayat-ayat yang menyerukan untuk melakukan perjalanan atau pariwisata dan menikmati berbagai fenomena dan keindahan alam. Pembahasan ini menghantarkannya pada penyerahan diri, ketundukan kepada-Nya. Dalam firman Allah Q.S Ali-Imran ayat 190, yang berbunyi:

---

<sup>6</sup>Rohi Baalbaki, *Al Mawrid A Modren Arabic English Dictionary* ( Beirut: dar al Ilm Almalayin, 1995), h. 569 dan 652.

<sup>7</sup> John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris* (Jakarta: PT. Gramedia, , 2010), h. 156.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ آل عمران :

﴿١٩٠﴾

*Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.*

Berdasarkan ayat di atas diterangkan “penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, berfikir dan orang-orang yang mau memperhatikan alam. Ayat ini menegaskan bahwa kepemilikan Allah SWT atas alamnya, apa yang ada di langit dan bumi adalah kepunyaannya yang harus dijaga dan dilestarikan dengan baik oleh orang-orang yang berakal.

Negara Indonesia tergolong sebagai negara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak. Indonesia juga banyak akan kekayaan alam dan budaya. Indonesia merupakan salah satu Negara dengan sumber penerimaan devisa terbesarnya adalah dari sektor pariwisata. Istilah pariwisata di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 1960-an. Istilah pariwisata diperoleh dari budayawan intelektual atas permintaan Presiden Sukarno (Bung Karno) kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Bung Sultan) selaku Ketua DTI (Dewan Tourisme Indonesia) pada tahun 1960-an itu. Istilah pariwisata terlahir dari bahasa Sanskerta yang komponen-komponenya terdiri dari: *Pari* yang berarti penuh, lengkap, berkeliling, *Wis (man)* yang berate rumah, property, kampung, komunitas, dan *Ata* yang berari pergi terus-menerus, mengembara yang bila dirangkai menjadi satu kata melahirkan istilah pariwisata, berarti: pergi secara lengkap meninggalkan rumah (kampung)

berkeliling terus-menerus. Dalam operasionalnya istilah pariwisata sebagai pengganti istilah asing *tourism* atau *travel* diberi makna oleh Pemerintah Indonesia: “Mereka yang meninggalkan rumah untuk mengadakan perjalanan tanpa mencari nafkah ditempat-tempat yang dikunjungi sambil menikmati kunjungan mereka”<sup>8</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara, sedangkan pariwisata dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 dimana pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>9</sup>

Beragam warisan budaya, iklim tropis, keberagaman etnis, daerah dengan tujuan wisata merupakan daya tarik tersendiri dan merupakan salah satu sektor andalan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Hal ini juga menjadikan Indonesia sebagai Negara yang harus dijelajahi oleh wisatawan domestik dan mancanegara.

Pada kenyataannya, sektor pariwisata merupakan salah satu titik fokus pembangunan yang saat ini digalakkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Setiap pemerintahan daerah diberikan tugas

---

<sup>8</sup> Nyoman S Pendit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), h. 3.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 1 ayat 3.

dan wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan dalam pengelolaan potensi-potensi yang dimiliki guna meningkatkan pembangunan daerah dan masyarakat. Salah satu potensi yang harus dikembangkan dan dikelola yaitu pariwisata lokal yang terdapat di daerah tersebut, sehingga dapat menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Maka keberpihakan pemerintah daerah terhadap pengembangan urusan pariwisata perlu lebih ditingkatkan.

Penyelenggaraan jasa pariwisata merupakan perangkat yang penting dalam pembangunan, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meratakan pendapatan masyarakat, memperkenalkan seni budaya dan keindahan alam. Kepariwisata juga dapat memberikan dorongan langsung terhadap kemajuan-kemajuan pembangunan atau perbaikan pelabuhan-pelabuhan (laut atau udara), jalan-jalan raya, pengangkutan setempat, program-program kebersihan atau kesehatan, pilot proyek sarana budaya dan kelestarian lingkungan dan sebagainya, yang semuanya dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik bagi masyarakat dalam lingkungan daerah wilayah yang bersangkutan maupun bagi wisatawan pengunjung dari luar<sup>10</sup>. Pariwisata juga merupakan salah satu sektor yang kompleks, karena melibatkan industri-industri klasik, seperti kerajinan tangan, cinderamata, usaha-usaha makanan

---

<sup>10</sup>Nyoman S Pendit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana...*, h.33.



kelas, penginapan dan transportasi yang juga merupakan salah satu faktor penyebab peningkatan pendapatan di daerah tersebut.

Selain hal-hal diatas, pengembangan sektor pariwisata melalui kegiatan promosi harus beragam, perlu diperhatikannya keunikan masing-masing di setiap tujuan wisata, menyadarkan masyarakat untuk menyadari peran, fungsi dan manfaat pariwisata, dan merangsang mereka untuk memanfaatkan peluang-peluang yang tercipta dan juga menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pengembangan pariwisata.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dimana tujuan dari kegiatan berpariwisata yang diantaranya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan dan lain-lain.

Kabupaten Way Kanan mempunyai tempat wisata alam yang sangat potensial jika dikembangkan secara baik, dan terdapat beberapa tempat wisata yang sudah dikontrol oleh pemerintah Kabupaten Way Kanan, seperti air terjun putri malu, wisata air terjun curug gangsa, bendungan way umpu, pemandian air panas, waduk meriam, curup kereta, kampung wisata gedung batin, kinciran, hampir keseluruhan wisata diatas, itu merupakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Way Kanan.<sup>11</sup>

Kebudayaan dan keindahan alam yang terdapat di Kabupaten Way Kanan dapat memberikan pengaruh besar dalam perkembangan

---

<sup>11</sup> M. Yazid Z, wawancara dengan penulis, Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Lampung, 06 Januari 2020.



pariwisata. Meskipun Way Kanan memiliki potensi alam yang luar biasa, namun dari sebagian besar potensi tersebut belum tergarap secara maksimal. Dapat dilihat dari beberapa wisata alam yang belum dapat diekspos dan dilihat dari segi sarana dan prasarannya pun masih ada yang belum terawat.

Kabupaten Way Kanan memiliki potensi alam yang pastinya dapat di andalkan apabila pemerintah daerah dan masyarakat setempat mampu meningkatkan dan mengelola potensi wisata tersebut, sehingga Way Kanan dapat menjadi salah satu tujuan untuk destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Selain itu, dengan adanya peningkatan wisata pasti meningkat pula wisatawan yang berkunjung dan ini akan menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Way Kanan.

Pemerintah (Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata) saat ini sedang dalam tahap pelaksanaan program-program pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Way Kanan, dimana beberapa tahun ini sangat dimaksimalkan, strategi merupakan suatu langkah maju mendukung semua program pariwisata khususnya di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan.

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Pariwisata diketahui bahwa Disporapar memiliki beberapa program kerja yaitu :<sup>12</sup>

1. Pengembangan Objek
2. Promosi
3. SDM Pariwisata

---

<sup>12</sup> Edwin Hendri, wawancara dengan penulis, Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Lampung, 06 Januari 2020.

Program-program tersebut sedang dijalankan saat ini dan akan terus dikembangkan.<sup>13</sup>

Kebudayaan di Way Kanan yang dapat memberikan kontribusi besar dalam perkembangan pariwisata dan kebudayaan sebagai tempat wisata domestik dan internasional. Kabupaten Way Kanan memiliki berbagai macam objek wisata alam dan wisata budaya yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik dengan tepat maka akan menjadi tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi. Selain itu, dengan meningkatnya wisatawan yang berkunjung maka akan secara langsung akan meningkatkan PAD.<sup>14</sup>

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Kepala Bidang Pariwisata dalam meningkatkan potensi wisata lokal di Kabupaten Way Kanan karena potensi wisata yang ada di Kabupaten Way Kanan masih belum tergarap dan belum dikelola dengan baik, serta masih diperlukannya peningkatan.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas, rumusan masalah yang diambil oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Pasal 17 Peraturan Bupati Way Kanan dalam meningkatkan potensi wisata lokal di Kabupaten Way Kanan?

---

<sup>13</sup> M. Yazid Z, wawancara dengan penulis, Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Lampung, 06 Januari 2020.

<sup>14</sup> Edwin Hendri, wawancara dengan penulis, Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Lampung, 06 Januari 2020.

2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* tentang Implementasi Pasal 17 Peraturan Bupati Way Kanan dalam meningkatkan potensi wisata lokal di Kabupaten Way Kanan ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 17 Peraturan Bupati Way Kanan dalam meningkatkan potensi wisata lokal di Kabupaten Way Kanan
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Pasal 17 Peraturan Bupati Way Kanan dalam meningkatkan potensi wisata lokal di Kabupaten Way Kanan.

#### **G. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Menurut dari segi teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pengembangan pariwisata, dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi di Fakultas Syariah, serta dapat menjadi sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang membutuhkan informasi pariwisata secara umum, dan berguna bagi peneliti dalam menambah wawasan mengenai pariwisata yang ada di Kabupaten Way Kanan.

## H. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisis data. Metode Penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.<sup>15</sup> Menurut Kartini Kartono, metode penelitian adalah “cara berfikir dan membuat yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian”.<sup>16</sup>

Dalam melakukan penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan ini termasuk kedalam penelitian lapangan atau *Field Research*, yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden<sup>17</sup> yang dimana dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Way Kanan dan Di tempat wisata yang ada di Kabupaten Way Kanan.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang berusaha untuk menentukan pemecahan masalah

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), h.136.

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet.VII (Bandung : Mandar Maju, 1996), h.15.

<sup>17</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 12.

yang ada sekarang berdasarkan data-data.<sup>18</sup> Penulis menggambarkan mengenai tugas dan fungsi dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Way Kanan dan Di tempat wisata yang ada di Kabupaten Way Kanan.

## 2. Sumber Data

Pengertian sumber data menurut Zulfafrian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>19</sup>

### a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber dari objek penelitian atau responden<sup>20</sup>, seperti *interview* (wawancara) kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kabid Bidang Pariwisata serta melakukan observasi secara langsung terhadap penelitian.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari responden, tetapi dari pihak ketiga<sup>21</sup>. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan seperti Ayat-ayat Alquran dan Hadits, Undang-undang Kepariwisata, brosur dan dokumen-dokumen yang di dapat dari sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dan Kepala

<sup>18</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 44.

<sup>19</sup> Zulfafrial dan Muhammad Lahir, *Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-2, ( Surakarta:Yuma Pustaka, 2012).

<sup>20</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian...* h.98.

<sup>21</sup> Wardiyanta., *metode penelitian pariwisata* (Yogyakarta: cv.Andi Offset, 2006). H. 28.

Bidang Pariwisata, buku-buku yang berkaitan dengan kepariwisataan, serta media on-line seperti jurnal dan blog.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek atau nilai yang akan diteliti dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.<sup>22</sup> Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh staff Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Pengelola wisata, dan pengunjung.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.<sup>24</sup> Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.<sup>25</sup> *Purposive sampling* yaitu memilih sekelompok subyek yang didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang di pandang mempunyai sangkutan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat

<sup>22</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian...*, h.120.

<sup>23</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), h.147.

<sup>24</sup> *Ibid*, h.120.

<sup>25</sup> *Ibid*. h. 155.

populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>26</sup> Dalam hal ini kriteria sampel yang ditentukan yaitu Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pariwisata, staff dinas, pengunjung wisata sebanyak 3 orang, dan Pengelola wisata.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data<sup>27</sup>

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

##### a. Interview

Menurut Mardalis, Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Kabid Priwisata, Para pengunjung wisata yang ada di Kabupaten Waykanan.

##### b. Observasi

---

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM,1983), h. 80.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 308.

<sup>28</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Cet Ke-7* (Jakarta: Bumi Aksara,2004), h.64.



Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ketempat yang akan diselidiki.<sup>29</sup> Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data yang terdapat di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang ada di Kabupaten Waykanan. Seperti wisata yang terdapat di waykanan, program kerja dari dinas tersebut.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.<sup>30</sup> Metode ini penulis gunakan sebagai metode pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian. Seperti brosur, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik pengelolaan data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.<sup>31</sup> Teknik pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV* (Jakarta: Rineka Cipta), h.124.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h.23.

<sup>31</sup> M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Grealia Indonesia, 2002), h. 22.



- a. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>32</sup>
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematis data (*sistemazing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah<sup>33</sup>.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang atau masyarakat yang berperilaku yang diamati.<sup>34</sup> Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat-tempat tertentu dan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

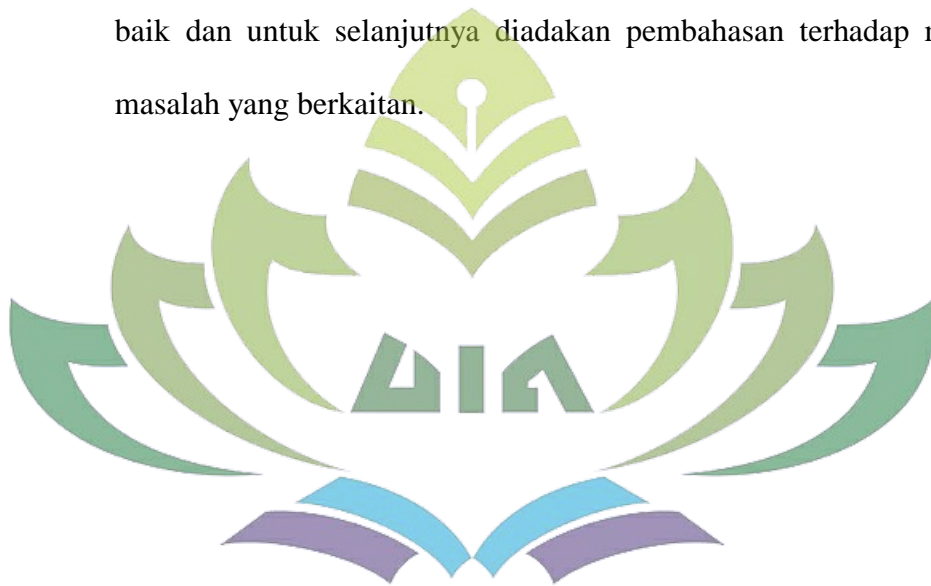
Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan kerangka berfikir sebagai induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus,

<sup>32</sup> Susiadi, *Metode Penelitian...*, h.115

<sup>33</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), h.45

<sup>34</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h.3.

peristiwa peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>35</sup> Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan data yang ada dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Dalam analisa data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan lapangan. Data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.



---

<sup>35</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach Jilid I* ...h.80.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Konsep Fiqh Siyasah

##### a. Pengetian dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Agar diperoleh pemahaman sesuai dengan apa yang dimaksud dengan *Fiqh Siyasah*, maka perlu dijelaskan pengertian dari masing-masing kata tersebut. Kata *Fiqh Siyasah* berasal dari dua kata yaitu kata *Fiqh* dan yang kedua yaitu *al-Siyasi*. Kata *Fiqh* secara bahasa adalah faham, sedangkan kata *al-Siyasi* yang artinya adalah mengatur.<sup>36</sup> Menurut istilah, *fiqh* adalah Ilmu atau pemahaman tentang hukum- hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*).<sup>37</sup> Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh *mujtahid* dengan jalan penalaran dan *ijtihad*.

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *fidh* adalah upaya yang dilakukan secara bersungguh-sungguh dari pada ulama untuk menggali hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh seluruh umat.

Secara etimologis (bahasa) kata Siyasah merupakan bentuk *masdar* (asal) dari *sasa*, *yasusu* yang artinya “mengatur, mengurus,

---

<sup>36</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h.21.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h 23

mengemudikan, memimpin, memerintah, politik dan pembuatan kebijakan”.<sup>38</sup> Menurut segi terminologinya (istilah) kata siyasah disini terdapat macam perbedaan menurut pendapat dikalangan ahli hukum Islam, antara lain yaitu:<sup>39</sup> Ibnu Manzhur, menurut beliau siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.<sup>40</sup> Abdul Wahhab Khalaf, menurut beliau definisi dari siyasah yaitu sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian diatas tentang pengertian *Fiqh Siyasah* dari segi etimologis, terminologi dan definisi dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dari *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>42</sup>

Secara umum, Secara umum, *fiqh siyasah* menggunakan metode-metode, seperti:

- 1) *Ijma*” adalah kesepakatan dan yang sepakat di sini adalah semua mujtahid muslim, berlaku dalam suatu masal tertentu

---

<sup>38</sup> *Ibid.*,h.24

<sup>39</sup> Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011),h.7.

<sup>40</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), h.45.

<sup>41</sup> Imam Amrusi Jailani, *Op.Cit.*, h.8

<sup>42</sup> Suyuthi Pulungan, *Op.Cit.*,h.26.

sesudah wafatnya Nabi.<sup>43</sup>

- 2) *Al-Qiyas*, *al-Qiyas* dalam *fiqh siyasah*, digunakan untuk mencari „*umum al-ma'na*“; mencari ilat hukum. Dengan menggunakan *al-qiyas*, hukum dari suatu masalah dapat diterapkan dengan masalah lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah dengan masalah yang disebutkan pertama.
- 3) *Al-Mashlahah al-Mursalah*, pada umumnya *Al-Mashlahah al-Mursalah* digunakan dengan mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah oleh karena itu, penerapan *Al-Mashlahah al-Mursalah* harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat; dan dalam kepustakaan fiqh dikenal dengan istilah *istiqra'*. Tanpa penelitian seperti itu penggunaan *Al-Mashlahah al-Mursalah* tidak akan menimbulkan kemaslahatan, tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.
- 4) *Sadd al-Dzari'ah* dan *Fath ak-Dzari'ah*. Dalam *fiqh siyasah*, *Sadd al-Dzari'ah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadatan. Sebaliknya *Fath ak-Dzari'ah* digunakan sebagai upaya perekayasa masyarakat untuk mencapai kemaslahatan. *Sadd al-Dzari'ah*

---

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 279.

dan *Fath ak-Dzari* "ah meupakan "alat" bukan "tujuan".

- 5) *Al-Adah*. Metode ketiga yang banyak digunakan dalam *fiqh siyasah* adalah *al-Adah*. *Adah* ini tedapat dua macam, yaitu: *al-„adah shohihah* dan *al-„adah al-fasidan*. *al-„adah shohihah* yaitu adat yang tidak menyalahi *syara*“, sedangkan *al-„adah al-fasidan* yaitu adat yang *betentangan dengan syara*’.
- 6) *Al-Istihsan*. *Al-Istihsan* sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang *mujtahid*. Dalam hubungan itu, dari dalil yang satu ke dalil yang lain, yang mana lebih kuat.
- 7) Kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah*. Kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah* sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan *fiqh siyasah*. Kaidah-kaidah itu bersifat umum.

Dengan demikian, *fiqh siyasah* harus diorientasikan kepada penolakan kemafsadatan sebanyak mungkin, dan pada saat yang sama pencapaian kemaslahatan yang sebanyak mungkin. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*, di antaranya ada yang membagimenjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang.

Menurut Imam al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup

kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyyah (peraturan perundang-undangan), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah qadha'iyyah (peradilan), siyasah harbiyyah (hukum perang) dan siyasah 'idariyyah (administrasi negara).<sup>44</sup> Adapun Iman Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu siyasah qadha'iyyah (peradilan), siyasah 'idariyyah (administrasi negara), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), dan siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah (hubungan internasional).<sup>45</sup>

Menurut Abdul Wahab Khalaf berpendapat fiqh siyasah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Abdul Wahhab khaliif membagi fiqh siyasah dalam 3 bidang kajian saja, yaitu *Siyasah Qadhaiyyah*, *Siyasah Dauliyyah* dan *Siyasah Maliyah*.<sup>46</sup> Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama termuka di Indonesia T.M. Hasbi Ashiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:<sup>47</sup>

- 1) *Siyasah Dusturiyyah Shar'iyyah* (Kebijaksanaan Tentang Peraturan Perundang-Undangan).
- 2) *Siyasah Tasyri'iyyah Shar'iyyah* (Kebijaksanaan Tentang

<sup>44</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp), h.20.

<sup>45</sup> Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyah*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, t.tp.).

<sup>46</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*, *Op.Cit.*, h15.

<sup>47</sup> Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.40.



Penetapan Hukum).

- 3) *Siyasah Maliyyah Shar''iyyah* (Kebijaksanaan Ekonomi Dan Moneter).
- 4) *Siyasah Qadhaliyyah Shar''iyyah* (Kebijaksanaan Peradilan).
- 5) *Siyasah Idariyyah Shar''iyyah* (Kebijaksanaan Administrasi Negara).
- 6) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Shar''iyyah* (Kebijaksanaan Luar Negeri dan Hubungan Internasional).
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Shar''iyyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang).
- 8) *Siyasah Harbiyyah Shar''iyyah* (Politik Peperangan).

Berdasarkan perbedaan diatas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu:<sup>48</sup>

- 1) *Siyasah Dusturiyyah*, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri''iyyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadhaiyyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.
- 2) *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah*, disebut juga politik luar negeri.

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan

---

<sup>48</sup> Imam Amrusi Jailani, *Op.Cit.*, h.16.



warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau *siyasah Harbiyyah*, yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

- 3) *Siyasah Maliyyah*, disebut juga politik keuangan dan moneter.

Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

b. Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah Dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. *Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan);
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya;
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya;
- 4) Persoalan *bai'at*;
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*;
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*;
- 8) Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya.

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah*

*dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok; pertama, dalil-dalil *kulli*, baik ayat-ayat Alquran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulli* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>49</sup> *Fiqh siyasah dusturiyah* dapat terbagi kepada:

- 1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlu halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dengan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
- 3) Bidang *siyasah qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Dalam bukunya Prof. H. A. Dzajuli menyebutkan

---

<sup>49</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009). h.48.

bahwasannya sumber *fiqh dusturi* pertama-tama adalah Al-Qur'an al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kully* dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kemudian hadis terutama sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Sumber ketiga adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama seperti *Al Maqasid al-sittah* (6 tujuan hukum islam) yaitu *hifdh al din* (memelihara agama), *hifdh al nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al aal* (memelihara akal), *hifdh al mal* (memelihara harta), *hifdh al nash* (memelihara keturunan), *hifdh al ummah* (memelihara umat). Terakhir sumber kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis.

#### c. Teori Kepemimpinan

Dalam Islam kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah SAW sama artinya yang terkandung dalam perkataan “amir” atau pengusaha. Oleh karena itu kedua istilah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemimpin formal. Selain kata khalifah disebut juga Ulil Amri yang satu akar dengan kata amir sebagaimana di atas. Kata

Ulil Amri berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿النساء : ٥٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*<sup>50</sup>

Istilah pemimpin dalam Islam ada beberapa bentuk, yaitu khalifah, imamah, imarah, wilayah, sultan, mulk, dan ri'asah. Imamah menurut al-Mawardi adalah suatu kedudukan atau jabatan yang dia dakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.<sup>51</sup> Istilah imam yang merujuk makna pemimpin dalam al-Quran yaitu:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿الفرقان : ٧٤﴾

Artinya: *"Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan*

<sup>50</sup> Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahnya, Diponegoro, Bandung, 2010, hlm. 80.

<sup>51</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Op, Cit.,* h.56

*Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".(Q.S al-Furqan ayat 74)*

Konsep kepemimpinan Islam berasal dari doktrin Tauhid dan dimulai oleh Muhammad sendiri. . Allah adalah otoritas terakhir dan Dia-lah sumber pengetahuan dan hukum dan hanya pengetahuan-Nya itulah kebenaran. Doktrin Islam adalah tergantung kepada dua prinsip yaitu Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan-Nya, juru bicara, pembawa pesan (Muhammad Rasul Allah).<sup>52</sup> Akibat logis teologis Islam, Hadis, ayat-ayat Al-qu"ran dan apa yang telah dibicarakan tersebut, adalah bahwa konsep kepemimpinan Islam mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut<sup>53</sup>:

- 1) Konsep kepemimpinan harus sesuai dengan ajaran Tauhid.
- 2) Allah adalah pemimpin umat.
- 3) Kepemimpinan bukan hanya kekuatan politik, tapi ia merupakan tanggung jawab sosial untuk memberikan keamanan dan kedamaian bagi umat Islam agar mampu mencapai maksud dan tujuan Ilahi.
- 4) Kepemimpinan sebagai tanggung jawab dalam Islam dimulai oleh Muhammad saw dan kepemimpinannya, pada risalah yang dibawanya (misinya sebagai Rasul Allah) dan otoritasnya bersifat sementara dan bukan asli.

---

<sup>52</sup> Mohammad Rusfi, "Validasi Maslahat Al-Mursalat Sebagai Sumber Hukum", Jurnal Al-Adalah Vol.XII No.1,

<sup>53</sup> A.Zaeny, *Pemimpin dalam Islam dan Pemikiran Politik Al-farabi*, Jurnal Tapis, (Lampung : Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2010), Vol. 6 No.11. h.42.

- 5) Kenabian adalah tanggung jawab menyebarkan firman Allah, memimpin dan membimbing umat dan mengajarkan serta mendidiknya agar mampu memenuhi tujuan Ilahi.
- 6) Kenabian dan kepemimpinan bukanlah kekuatan atau kekuasaan politik, melainkan tanggung jawab.
- 7) Tidaklah benar menambahkan kata sifat “religius” kepada kepemimpinan (kepemimpinan religius) dalam Islam karena ia bukan saja kepemimpinan dalam urusan-urusan agama, tetapi umum, karena tidak ada pemisahan antara agamadan politik dalam Islam. Islam adalah agama yang mencakup semua, dan kepemimpinan dalam Islam juga mencakup keseluruhan.
- 8) Kepemimpinan dalam Islam tak dapat dimonopoli oleh suatu kelompok, suatu ras, suatu bangsa, dan sebagainya.
- 9) Kepemimpinan bukanlah jabatan yang turun temurun
- 10) Tidak ada hirarki dan orde militer dalam kepemimpinan Islam.

Islam memberi pedoman memilih pemimpin yang baik yang terdapat di Al- Qur’an. Dalam memilih pemimpin yang baik, harus dipenuhi persyaratannya tercantum dalam Al-Qur’an terdapat dalam beberapa surah, yaitu: QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء : ٥٨)

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan*

*(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Qs. An-Nisa ayat 58)*

Syarat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah memiliki kemampuan yang dapat menunjang keefektifan kepemimpinan, berikut syarat- syarat pemimpin menurut para filsuf muslim, diantara :

- 1) Al-Farabi menetapkan sembilan syarat yang harus dipenuhi seseorang yang akan menjadi pemimpin. Kesembilan syarat pemimpin tersebut adalah:<sup>54</sup>
  - a). Seorang pemimpin harus memiliki anggota badan yang lengkap.
  - b). Memiliki daya pemahaman yang baik.
  - c). Tinggi intelektualitasnya.
  - d). Memiliki kepandaian dalam mengemukakan pendapat dan mudah dimengerti uraiannya.
  - e). Mencintai pendidikan dan gemar mengajar.
  - f). Tidak rakus dalam hal makanan, minuman dan perempuan.
  - g). Mencintai kejujuran, berjiwa besar, dan berbudi luhur.
  - h). Mencintai keadilan.

---

<sup>54</sup> Al-farabi, Abu Nasr Muhammad bin Muhammad bin Tarkhan bin Unzlagh, *Ar-u Ahl al- Madīnah al-Fadīlah*, h. 15.



- i). Kuat pendiriannya.
- 2) Imam al-Ghazali mengemukakan sepuluh syarat bagi seseorang yang akan menjadi pemimpin, yaitu:<sup>55</sup>
  - a). Seorang yang akan menjadi pemimpin adalah orang yang telah dewasa.
  - b). Memiliki pikiran yang sehat.
  - c). Seorang yang merdeka.
  - d). Seorang pemimpin haruslah berjenis kelamin laki-laki.
  - e). Keturunan quraisy.
  - f). Mempunyai pendengaran dan penglihatan yang sehat.
  - g). Memiliki kekuasaan yang nyata.
  - h). Mempunyai hidayah.
  - i). Memiliki ilmu pengetahuan.
  - j). Mampu mengendalikan diri dari perbuatan tercela.
- 3) Berdasarkan penjelasan al-Mawardi terdapat syarat-syarat seseorang yang berhak dipilih sebagai pemimpin (imam) yaitu:<sup>56</sup>
  - a). Keseimbangan (*al-., adalah*) yang memiliki semua criteria.
  - b). Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum.

<sup>55</sup> Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press 1993), cet. V, h. 78.

<sup>56</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Op., Cit*, h.19-20.

- c). Lengkap dan sehat fungsi panca indranya.
- d). Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalangi untuk bergerak dan bertindak.
- e). Visi pemikirannya Baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan umat.
- f). Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh.
- g). Mempunyai nasab dari Quraisy.

## **2. Pengertian Pariwisata**

### **a. Definisi Pariwisata**

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Kondisi tersebut memberikan potensi yang sangat besar bagi pengembangan wisata Indonesia. Kekayaan alam dan keanekaragaman budaya menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain yang menjadikan hal tersebut sebagai komponen penting dalam pariwisata Indonesia.

Bidang pariwisata merupakan sektor penting dalam perekonomian nasional maupun regional. Banyak alasan mengapa

sebuah negara, khususnya negara yang sedang berkembang, merancang kebijakan pariwisata. Disamping alasan mendasar bahwa segala sumber daya harus dapat digunakan dan dialokasikan seefisien mungkin, pariwisata juga mampu memberikan kontribusi yang penting terhadap perekonomian negara.<sup>57</sup> Bidang pariwisata mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional maupun regional, baik sebagai sumber devisa negara maupun sumber lapangan kerja bagi masyarakat kota dan desa, serta memperkenalkan alam dan nilai budaya bangsa.<sup>58</sup>

Secara etimologis, kata “pariwisata” yang berasal dari bahasa Sanskerta, sesungguhnya bukanlah berarti “*tourisme*” (bahasa belanda) atau “*tourism*” (bahasa inggris). Kata pariwisata, menurut pengertian ini, sinonim dengan pengertian “*tour*”. Pendapat ini berdasarkan pemikiran sebagai berikut: kata pariwisata terdiri atas dua suku kata yaitu masing-masing kata “*pari*” dan “*wisata*”. *Pari* berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap (ingat kata paripurna). *Wisata* berarti perjalanan, berpergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata “*travel*” dalam bahasa inggris. Atas dasar itu maka kata pariwisata seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke

---

<sup>57</sup> Talitha Inas Qotiha, Amiek Soemarmi, Budi Ispiyarso, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Meningkatkan Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No.2, 2017.

<sup>58</sup> Nabila Safira Kamal, Ratna Herawati dan Amiek Soemarmi, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.2, 2016

tempat yang lain, yang dalam bahasa inggris disebut dengan kata “*tour*”, sedangkan untuk pengertian jamak, kata “Kepariwisataa<sup>59</sup>an” dapat digunakan dengan kata “*tourisme*” atau “*tourism*”<sup>59</sup>.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, perhatikanlah penyebaran kata-kata sebagai berikut<sup>60</sup>:

- 1) Wisata adalah Perjalanan dalam bahasa inggris dapat disamakan dengan perkataan “*travel*”
- 2) Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan; dalam bahasa inggris dapat disebut dengan istilah “*travellers*”
- 3) Para wisatawan adalah orang-orang yang melakukan perjalanan dan dalam bahasa inggris biasa disebut dengan istilah “*travellers*” (jamak).
- 4) Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam bahasa inggris disebut dengan istilah “*tour*”.
- 5) Pariwisataawan adalah orang yang melakukan perjalanan tour dan dalam bahasa inggris disebut “*tourist*”
- 6) Para pariwisataawan adalah orang-orang yang melakukan perjalanan tour dan dalam bahasa inggris disebut dengan istilah “*tourists*” (jamak).

<sup>59</sup> Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: ANGKASA, 1996).... h.112-113

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 113

- 7) Ke-pariwisataan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata dan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tourism*”.

Demikian pengertian dari istilah-istilah tersebut di atas bila ditinjau dari segi asal-usul kata atau etimologis. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 kepariwisataan adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, Pengusaha, dan Pemerintah Daerah.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>61</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa Pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi.<sup>62</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam rangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata adalah berbagai

---

<sup>61</sup>Peraturan Bupati Kabupaen Way Kanan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan.

<sup>62</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.583

macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>63</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang didukung dengan segala fasilitas sekaligus kegiatan wisata yang menguntungkan berbagai pihak apabila dikelola dengan baik.

#### **b. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pariwisata**

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan perjalanan. Pada hakekatnya Allah SWT menciptakan manusia dengan beragam suku dan budaya untuk saling memahami budaya masing-masing yang kemudian untuk bertakwa kepada-Nya. Dalam kitab Al-Qur'an maupun sunnah terdapat ayat-ayat yang menyerukan untuk melakukan perjalanan atau berpariwisata dan menikmati berbagai fenomena dan keindahan alam. Dalam firman Allah Q.S Ali-Imran ayat 190, yang berbunyi:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾  
 عمران : ١٩٠

*Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.*

Berdasarkan ayat di atas diterangkan “penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda

---

<sup>63</sup>Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Kepariwisataaan.

kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, berfikir dan orang-orang yang mau memperhatikan alam. Dalam ayat ini menegaskan bahwa kepemilikan Allah SWT atas alamnya, apa yang ada di langit dan bumi adalah kepunyaannya yang harus dijaga dan dilestarikan dengan baik oleh orang-orang yang berakal.

Selain ayat di atas terdapat pula ayat menjelaskan untuk melakukan perjalanan atau berwisata di muka bumi yaitu :

Dalam Q.S Al- Ankabut ayat 20, Allah SWT berfirman:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Katakanlah, berjalanlah di muka bumi maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”.

Berdasarkan surat diatas Allah SWT telah mengisyaratkan manusia untuk berjalan di muka bumi untuk dijelajahi sebagai pejalanan kemudian diambil hikmahnya. Dalam Al-Qur'an banyak terdapat penjelasan tentang tujuan dari wisata, antara lain:<sup>64</sup>

- 1) Menenal sang pencipta dan meningkatkan nilai spiritual

Tujuan Islam dalam menggalakkan pariwisata, yang merupakan tujuan paling utama adalah untuk mengenal Tuhan.

Dalam beberapa ayat dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah

<sup>64</sup>Ibnu Katsir, Imaduddin Abu al-Fida' Ismail, *Tafsir al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar Maktabah al-Hilal, 1986M), Cet I, h.554.



SWT menyeru kepada manusia untuk melakukan perjalanan di atas bumi dan memikirkan berbagai fenomena dan penciptaan alam. Dalam Qs. Ankabut ayat 20

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya : Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Qs. Ankabut : 20)

- 2) Berbisnis, membuka peluang usaha sebagai salah satu pemberdayaan potensi daerah

Dewasa ini, perdagangan juga menjadi salah satu tujuan yang paling penting dari pariwisata. Dalam Islam mencari penghasilan dengan melalui usaha yang benar dan halal merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Qs. Al- Quraaisy ayat 1-4

لَا يَلَافُ قُرَيْشٌ ﴿١﴾ إِلَّا يَلَافُهُمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

Artinya : Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah), Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. (Qs. Al- Quraaisy ayat 1-4)

### 3) Menambah wawasan keilmuan

Faktor ilmu dan wawasan juga merupakan faktor penting yang membuat pariwisata berkembang dalam budaya islam. Sejak masa munculnya islam, agama ini telah termotivasi umatnya dalam menuntut ilmu, bahkan sampai ke negeri yang jauh. Salah satu sebab terpenting dari tumbuh berkembangnya peradaban Islam adalah perjalanan pariwisata yang bertujuan menuntut ilmu pengetahuan. Dalam Qs. Ali Imran ayat 137<sup>65</sup>

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾

*Artinya Sesungguhnya telah berlalu telah sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). (Q.s. Ali Imran:137)*

### 4) Mendapatkan ketenangan jiwa dan kebersihan hati

Tujuan lain dari dorongan Islam terhadap umatnya untuk melakukan perjalanan wisata, adalah untuk mendapatkan kesempatan bersenang-senang dengan cara yang sehat.

Kepariwisataan merupakan suatu kegiatan bisnis yang berdimensi Internasional dan kepastian hukum menjadi suatu hal yang wajib. Faktor utama yang sangat menentukan didalam

<sup>65</sup> Dapertemen Agama RI, Alquran dan terjemahan, *Al imran* 104, (Bandung: cv penerbit Diponegoro, 2014), h. 63

penyelenggaraan kepariwisataan adalah kepastian hukum yang ada.

Berdasarkan segi hukum di Indonesia terdapat peraturan-peraturan yang menganjurkan manusia untuk melakukan perjalanan, yaitu Undang-undangan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, PP Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Perjalanan Wisata, dan dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 49 Tahun 2016 dalam pasal 17 yang membahas tentang Tugas dan Fungsi Kepala Pariwisata.

### c. Jenis-jenis Pariwisata

Kepariwisataan tidak menggejala sebagai bentuk tunggal. Istilah umum sifatnya yang menggambarkan beberapa bentuk perjalanan dan penginapan sesuai dengan motivasi yang mendasari kepergian tersebut. Pariwisata sebagai bentuk gejala, terwujud dalam beberapa bentuk yang antara lain misalnya sebagai berikut<sup>66</sup>:

- 1) Menurut letak geografis, dimana kegiatan pariwisata berkembang :

---

<sup>66</sup> Oka a yoeti pengantar ilmu pariwisata, bandung angkassa, 1982, h.111-120

a) Pariwisata lokal (*local tourism*) yaitu jenis pariwisata semacam ini adalah pariwisata setempat, yang mempunyai ruang lingkup relatif sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja. Misalnya kepariwisataan kota Bandung atau kepariwisataan di daerah DKI Jaya saja.

b) Pariwisata regional (*regional tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu tempat atau daerah yang ruang lingkungannya lebih luas bila dibandingkan dengan “*local tourism*”, tetapi lebih sempit jika dibandingkan dengan kepariwisataan nasional (*national tourism*). Contohnya kepariwisataan Sumatra Utara, Bali, dan lain-lain.

c) Pariwisata nasional (*national Tourism*)

(1) Kepariwisataan dalam arti sempit

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang dalam wilayah suatu Negara. Pengertian ini sinonim dengan pengertian “pariwisata dalam negeri” atau *domestic tourism*, di mana titik beratnya orang yang melakukan perjalanan wisata adalah warga negara sendiri dan orang-orang asing yang berdomisili di negara tersebut.

(2) Kepariwisataan nasional dalam arti luas

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang dalam suatu wilayah suatu negara, selain kegiatan “*domestic tourism*” juga dikembangkan “*foreign tourism*” di mana di dalamnya termasuk “*in bound tourism*” dan “*out going tourism*”. Jadi di sini, selain adanya lalu lintas wisatawan di dalam negeri sendiri, juga ada lalu lintas wisatawan dari luar negeri, maupun dari dalam negeri keluar negeri.

- d) *Regional-Internasional Tourism*, yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut. Misalnya kepariwisataan ASEAN, Timur Tengah, Asia Selatan, Eropa Barat, dan lain-lain.

- e) *Pariwisata Internasional (International tourism)*  
pengertian ini sinonim dengan kepariwisataan dunia (*world tourism*), yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di seluruh Negara di dunia, termasuk di dalamnya, selain “*regional-international*” juga kegiatan “*national tourism*”.

2) Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran

- a) *In tourism atau Pariwisata aktif.*

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke satu Negara tertentu. Di sebut dengan pariwisata aktif, karena dengan masuknya wisatawan asing tersebut, berarti dapat memasukkan devisa bagi Negara yang dikunjungi yang dengan sendirinya akan memperkuat posisi neraca pembayaran Negara yang dikunjungi wisatawan tersebut. Ditinjau dari segi pemasukan devisa maka jenis pariwisata ini harus mendapat perhatian pertama untuk dikembangkan, karena sifatnya yang “*quick yielding*” tersebut.

b) *Out going touris atau Pariwisata pasif*

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluarnya warga Negara sendiri berpergian ke luar negeri sebagai wisatawan. Disebut sebagai pariwisata pasif karena ditinjau dari segi pemasukan devisa Negara, kegiatan ini merugikan Negara asal wisatawan, karena uang yang seharusnya dibelanjakan di dalam negeri dibawa ke luar negeri dan tidak ada arti ekonominya bagi Negara sendiri. Karena itu jarang suatu Negara bekeinginan untuk mengembangkan pariwisata semacam ini.

3) Menurut alasan/tujuan perjalanan

1) *Business tourism*

Yaitu jenis pariwisata dimana pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, usaha dagang atau yang berhubungan dengan pekerjaannya, kongres, seminar, *convention*, *symposium*, musyawarah kerja.

2) *Vocational tourism*

Yaitu jenis pariwisata dimana orang-orang yang melakukan perjalanan wisata terdiri dari orang-orang yang sedang berlibur, cuti atau pakansi.

3) *Educational tourism*

Yaitu jenis pariwisata dimana pengunjung atau orang melakukan perjalanan untuk tujuan belajar atau mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuan. Termasuk kedalamnya adalah darmawisata (*study tour*).

4) Menurut saat atau waktu berkunjung

a) *Seasonal Tourism*

Yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musim-musim tertentu. Contoh: *summer tourism*, *winter tourism*, dan lain-lain.

b) *Occasional Tourism*

Yaitu jenis pariwisata dimana perjalanan wisatanya dihubungkan dengan kejadian (*occasion*) maupun suatu *event*, seperti misalnya Galungan dan Kuningan di Bali,



Sekaten di Yogyakarta atau panjat jimat dicirebon, *cherry blossom* festival di Tokyo atau Washington, pesta air di Negara-negara yang beragama hindu (India, Burma, Muangthai, Kamboja, Hongkong, atau Singapore).

## 5) Pembagian Menurut Objeknya

### a) *Cultural tourism*

Yaitu jenis pariwisata di mana motivasi orang-orang untuk melakukan perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik dari seni -budaya suatu tempat atau daerah. Jadi objek kunjungannya adalah warisan nenek moyang, benda-benda kuno. Sering perjalanan wisata semacam ini dengan kesempatan untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan kebudayaan itu sendiri di tempat yang di kunjunginya.

### b) *Recuperation tourism*

Biasanya disebut sebagai pariwisata kesehatan. Tujuan daripada orang-orang untuk melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan penyakit, seperti mandi di sumber air panas, mandi lumpur seperti yang banyak dijumpai di Eropa atau mandi susu, mandi kopi di Jepang, yang katanya dapat membuat orang menjadi awet muda.

### c) *Commercial tourism*

Disebut sebagai pariwisata perdagangan, karena perjalanan wisata ini dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional atau internasional, di mana sering di adakan kegiatan *Expo, Fair, Exhibition* dan lain-lain.

d) *Sport tourism*

Biasanya disebut dengan istilah pariwisata olah raga, yang dimaksud dengan jenis pariwisata ini ialah perjalanan orang-orang yang bertujuan untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olah raga di suatu tempat atau Negara tertentu, seperti Olimpiade, *All England*, Pertandingan Tinju atau sepak bola, atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu sendiri.

e) *Political tourism*

Biasanya disebut sebagai pariwisata politik, yaitu suatu perjalanan yang tujuannya untuk melihat atau menyaksikan peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu Negara. Misalnya menyaksikan peringatan hari kemerdekaan suatu Negara.

f) *Social tourism*

Pariwisata sosial jangan hendaknya diasosiasikan sebagai suatu pariwisata yang berdiri sendiri. Pengertian ini hanya dilihat dari segi penyelenggaraanya saja yang

tidak menekankan untuk mencari keuntungan ,  
misalnya *study tour*, *picnic*, dan lain-lain.

g) *Religion tourism*

Yaitu jenis pariwisata dimana tujuan perjalanan yang  
dilaukan adalah untuk melihat motivasi wisatawan untuk  
melakukan perjalanan tujuannya melihat atau  
menyaksikan upacara-upacara keagamaan, seperti  
upacara Bali Krama di Besakih, Haji Umroh bagi agama  
Islam.

h) *Marine tourism*

Merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana  
dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam,  
dan olah raga lainnya, termasuk saran adan prasarana  
akomodasi, makan dan minum.

6) Menurut jumlah orang yang melakukan perjalanan

- a) *Individual tourism* yaitu seorang wisatawan atau satu keluarga yanag melakukan perjalanan secara bersama.
- b) *Family group tourism* yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh serombongan keluarga yang masih mempunyai kekerabatan satu sama lain.
- c) *Group tourism* yaitu jenis pariwisata yang melakukan perjalanan wisata itu terdiri dari banyak orang yang

bergabung dalam satu rombongan yang biasa diorganisir oleh sekolah, organisasi, atau *tour operator/travel agent*.

- 7) Menurut alat pengangkutan yang digunakan
  - a) *Land tourism* yaitu jenis pariwisata yang dalam kegiatannya menggunakan transportasi darat, seperti bus, taxi, dan kereta api.
  - b) *Sea tourism* yaitu kegiatan kepariwisataan yang menggunakan angkutan laut untuk mengunjungi suatu daerah tujuan wisata.
  - c) *Air tourism* yaitu jenis kegiatan pariwisata yang menggunakan angkutan udara dari dan ke daerah tujuan wisata.
- 8) Menurut umur yang melakukan perjalanan
  - a) *Youth tourism* yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan bagi para remaja yang suka melakukan perjalanan wisata dengan harga relatif murah.
  - b) *Abdult tourism* yaitu kegiatan pariwisata yang diikuti oleh orang-orang yang berusia lanjut. Biasanya orang yang melakukan perjalanan adalah para pensiunan.
- 9) Menurut jenis kelamin
  - 1) *Masculine tourism* yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya hanya diikuti oleh kaum pria saja, seperti *safari, hunting, dan adventure*.

- 2) *Feminime tourism* yaitu jenis pariwisata yang hanya diikuti oleh kaum wanita saja, seperti rombongan untuk menyaksikan demonstrasi memasak.
- 10) Menurut harga dan tingkat social
  - 1) *Delux tourism* yaitu perjalanan wisata yang menggunakan fasilitas standar mewah, baik alat angkutan, hotel maupun atraksinya.
  - 2) *Middle class tourism* yaitu jenis perjalanan wisata yang diperuntukkan bagi mereka yang menginginkan fasilitas dengan harga tidak terlalu mahal, tetapi tidak terlalu jelek pelayanannya.
  - 3) *Social tourism* yaitu perjalanan wisata yang penyelenggarannya dilakukan secara bersama dengan biaya yang diperuntukkan semurah mungkin dengan fasilitas cukup memadai selama dalam perjalanan.

#### **d. Tujuan dan Fungsi Pariwisata**

##### **1) Penyelenggaraan Kepariwisataan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, kepariwisataan memiliki tujuan sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;

---

<sup>67</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan



- c) Menghapus kemiskinan;
- d) Mengatasi pengangguran;
- e) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f) Memajukan kebudayaan;
- g) Mengangkat citra bangsa;
- h) Memupuk rasa cinta tanah air;
- i) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j) Mempererat persahabatan antar bangsa.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 juga menjelaskan tentang fungsi kepariwisataan. Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

#### e. **Objek dan Daya Tarik Pariwisata**

Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasilbuatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.

Suatu objek wisata dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan harus memenuhi syarat-syarat untuk pengembangan daerahnya, sebagai berikut:<sup>68</sup>

1) *What to see*

Pada tempat tersebut harus ada objek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan yang dimiliki daerah lain. Dengan kata lain daerah tersebut harus memiliki daya tarik khusus dan atraksi budaya yang dapat dijadikan “*entertainment*” bagi wisatawan. *What to see* meliputi pemandangan alam, kegiatan kesenian, dan atraksi wisata.

2) *What to do*

Pada tempat tersebut selain banyak yang dilihat dan disaksikan, harus disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lama di tempat itu.

3) *What to buy*

Tempat tujuan wisata harus tersedia fasilitas untuk berbelanja terutama barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk di bawa pulang ke tempat asal.

4) *What to arrived*

Pada bagian ini termasuk aksesibilitas yaitu cara kita mengunjungi objek wisata tersebut, kendaraan apa yang akan

---

<sup>68</sup> E Maryani,...Pengantar Geografi Pariwisata (Bandung: Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS IKIP, 1991) h.11.

digunakan, dan berapa lama tiba ketempat tujuan wisata tersebut.

5) *What to stay*

Seperti apa wisatawan akan tinggal untuk sementara selama dia berlibur di objek wisata itu. Diperlukan penginapan-penginapan baik hotel berbintang atau hotel non berbintang dan sebagainya. Selain itu pada umumnya daya tarik suatu wisata berdasarkan atas:

- a) Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih;
- b) Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya;
- c) Adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka;
- d) Adanya sarana dan prasarana pengunjung untuk melayani para wisatawan yang hadir;
- e) Objek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi karena keindahan alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dan sebagainya;
- f) Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang

terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau.

Perkembangan suatu kawasan wisata juga tergantung pada apa yang dimiliki kawasan tersebut untuk dapat ditawarkan kepada wisatawan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari peranan para pengelola kawasan wisata. Berhasilnya suatu tempat wisata hingga tercapainya industri wisata sangat tergantung pada tiga A (3A), yaitu Atraksi (*Attraction*), Mudah dicapai (*Accessability*), dan Fasilitas (*Amenities*).<sup>69</sup>

#### 1) Atraksi (*Attraction*)

Atraksi wisata yaitu sesuatu yang dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat dilihat, dinikmati dan yang termasuk dalam hal ini adalah: tari-tarian, nyanyian, kesenian rakyat tradisional, upacara adat, dan lain-lain.

*Tourism* disebut *attractive spontance*, yaitu segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang bisa datang berkunjung ke tempat tujuan wisata yang diantaranya adalah:<sup>70</sup>

- a) Benda-benda yang tersedia dan terdapat di alam semesta, yang dalam istilah *Natural Ameneities*. Termasuk kelompok ini adalah Iklim contohnya, curah hujan, sinar matahari, panas, hujan, dan salju.

<sup>69</sup>Yoeti, Oka A., *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997).h. 165.

<sup>70</sup>*Ibid.*,h.172.

Bentuk tanah dan pemandangan contohnya pegunungan, perbukitan, pantai, air terjun, dan gunung api, hutan belukar, flora dan fauna, yang tersedia di cagar alam dan daerah perburuan. Pusat-pusat kesehatan, misalnya, sumber air mineral, sumber air panas, dan mandi lumpur. Dimana tempat tersebut diharapkan dapat menyembuhkan macam-macam penyakit.

- b) Hasil ciptaan manusia. Kelompok ini dapat dibagi dalam empat produk wisata yang berkaitan dengan tiga unsur penting yaitu *Historical* (sejarah), *Cultural* (budaya), dan *Religious* (agama) Monumen bersejarah dan sisa peradaban masa lampau *artifact* (museum), *art gallery*, perpustakaan, kesenian rakyat dan kerajinan tangan. Acara tradisional, pameran, festival, upacara naik haji, pernikahan, khitanan, dan lain-lain. Rumah-rumah ibadah, seperti masjid, candi, gereja, dan kuil.

## 2) Aksesibilitas (*accessibility*)

Aktivitas kepariwisataan banyak tergantung pada transportasi dan komunikasi karena faktor jarak dan waktu yang sangat mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Unsur yang terpenting dalam

aksesibilitas adalah transportasi, maksudnya yaitu frekuensi penggunaannya, kecepatan yang dimilikinya dapat mengakibatkan jarak seolah-olah menjadi dekat. Selain transportasi yang berkaitan dengan aksesibilitas adalah prasarana meliputi jalan, jembatan, terminal, stasiun dan bandara. Prasarana ini berfungsi untuk menghubungkan suatu tempat dengan tempat yang lain. Keberadaan prasarana transportasi akan mempengaruhi laju tingkat transportasi itu sendiri. Kondisi prasarana yang baik akan membuat laju transportasi menjadi optimal.

### 3) Fasilitas (*Amenities*)

Secara umum pengertian *amenities* adalah segala macam prasarana dan sarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti: penginapan (*accommodation*), rumah makan (*restaurant*); transportasi dan agen perjalanan. Berikut ini akan diuraikan secara lebih rinci mengenai prasarana dan sarana yang dimaksud seperti:<sup>71</sup>

#### a) Usaha Penginapan

Akomodasi adalah tempat dimana wisatawan bermalam untuk sementara di suatu daerah wisata. Sarana akomodasi umumnya dilengkapi

---

<sup>71</sup> I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar, Bali: Pustaka Larasan, 2017) h. 103



dengan sarana untuk makan dan minum. Sarana akomodasi yang membuat wisatawan betah adalah akomodasi yang bersih, dengan pelayanan yang baik (ramah, tepat waktu), harga yang pantas sesuai dengan kenyamanan yang diberikan serta lokasi yang relatif mudah dijangkau. Jenis-jenis akomodasi berdasarkan bentuk bangunan, fasilitas, dan pelayanan yang disediakan, adalah sebagai berikut:

(1) *Hotel*

Hotel merupakan sarana akomodasi (menginap) yang menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan bagi tamunya seperti pelayanan makanan dan minuman, layanan kamar, penitipan dan pengangkatan barang, pencucian pakaian, serta pelayanan tambahan seperti salon kecantikan, rekreasi (contoh: sarana bermain anak), olahraga (contoh: kolam renang, lokasi senam, lapangan tenis, biliard, dan lain-lain). Klasifikasi hotel dapat dilihat dari lokasi, jumlah kamar, ukuran, serta kegiatan yang dapat dilakukan tamu di hotel selama menginap.

(2) *Guest house*

*Guest house*, adalah jenis akomodasi yang bangunannya seperti tempat tinggal. Umumnya *guest house* hanya memiliki fasilitas dasar yaitu kamar dan sarapan tanpa fasilitas tambahan lainnya.

(3) *Homestay*

Berbeda dengan *guest house*, *homestay*, jenis akomodasi yang populer di wilayah perkotaan maupun pedesaan di Indonesia, menggunakan rumah tinggal pribadi sebagai tempat wisatawan menginap. Umumnya *homestay* memberikan pelayanan kamar beserta makanan dan minuman. Salah satu kelebihan dari *homestay* adalah wisatawan bisa mendapatkan kesempatan untuk mengenal keluarga pemilik. Mereka bisa juga mengenal lebih jauh tentang alam dan budaya sekitar terutama apabila pemilik rumah memiliki banyak pengetahuan tentang itu.

(4) *Losmen*

*Losmen* merupakan jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau keseluruhan bangunan sebagai tempat menginap. *Losmen* memiliki fasilitas dan pelayanan yang jauh lebih

sederhana dibandingkan hotel. Losmen tidak dirancang menyerupai tempat tinggal seperti *guest house*.

(5) Perkemahan

Tidak seperti jenis akomodasi lainnya, perkemahan merupakan sarana menginap yang memanfaatkan ruang terbuka dengan menggunakan tenda.

(6) Vila

Merupakan kediaman pribadi yang disewakan untuk menginap. Bedanya dengan *homestay* adalah tamu akan menyewa rumah secara keseluruhan dan pemilik rumah tidak berada pada rumah yang disewa tersebut. Sedangkan pada *homestay*, tamu hanya menyewa kamar dan berbaur bersama pemilik rumah.

b) Usaha makanan dan minuman

Usaha makanan dan minuman di daerah tujuan wisata merupakan salah satu komponen pendukung penting. Usaha ini termasuk di antaranya restoran, warung atau kafe. Wisatawan akan kesulitan apabila tidak menemui fasilitas ini pada daerah yang mereka kunjungi. Sarana akomodasi umumnya menyediakan

fasilitas tambahan dengan menyediakan makanan dan minuman untuk kemudahan para tamunya. Selain sebagai bagian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, makanan adalah nilai tambah yang dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Banyak wisatawan tertarik untuk mencoba makanan lokal, bahkan ada yang datang ke daerah wisata hanya untuk mencicipi makanan khas tempat tersebut sehingga kesempatan untuk memperkenalkan makanan lokal terbuka lebar. Bagi wisatawan, mencicipi makanan lokal merupakan pengalaman menarik. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam mengelola usaha makanan dan minuman adalah jenis dan variasi hidangan yang disajikan, cara penyajian yang menarik, kebersihan makanan dan minuman yang disajikan, kualitas pelayanan serta lokasi usaha tersebut. Penyedia jasa harus memperhatikan apakah lokasi usahanya menjadi satu dengan sarana akomodasi, atau dekat dengan obyek wisata sehingga mudah dikunjungi.

c) Transportasi dan infrastruktur

Wisatawan memerlukan alat transportasi baik itu transportasi udara, laut dan darat untuk mencapai

daerah wisata yang menjadi tujuannya. Tersedianya alat transportasi adalah salah satu kunci sukses kelancaran aktivitas pariwisata. Komponen pendukung lainnya adalah infrastruktur yang secara tidak langsung mendukung kelancaran kegiatan pariwisata misalnya: air, jalan, listrik, pelabuhan, bandara, pengolahan limbah dan sampah. Namun, meskipun tidak semua daerah tujuan wisata memiliki komponen pendukung yang baik, suatu daerah tetap bisa menarik wisatawan untuk berkunjung karena ada hal-hal unik yang hanya bisa ditemui atau dilihat di tempat tersebut.

Pembangunan suatu objek wisata harus dirancang dengan bersumber pada potensi daya tarik yang dimiliki objek tersebut dengan mengacu pada kriteria keberhasilan pengembangan yang meliputi berbagai kelayakan, yaitu diantaranya adalah<sup>72</sup>:

- 1) Kelayakan Finansial

Studi kelayakan ini menyangkut perhitungan secara komersial dari pembangunan rugi sudah harus diperkirakan dari awal. Berapa tenggang waktu yang dibutuhkan untuk modal pun sudah harus diramalkan.

- 2) Kelayakan Sosial Ekonomi Regional

---

<sup>72</sup>M. Yazid Z, wawancara dengan penulis, Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Lampung, 28 Juli 2020.

Study kelayakan ini dilakukan untuk melihat apakah investasi yang ditanamkan untuk membangun objek wisata juga akan memiliki sosial ekonomi regional; dapat menciptakan lapangan kerja atau meningkatkan, dapat meningkatkan penerimaan devisa, dapat meningkatkan penerimaan di sektor lain seperti pajak, perindustrian, perdagangan, pertanian, dan lain-lain. Dalam pertimbangannya hal ini mempertimbangkan tidak semata-mata komersial saja tetapi juga memperhatikan pertimbangannya lebih luas.

### 3) Layak Teknis

Pembangunan objek wisata harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dengan melihat daya dukung yang ada. Tidak perlu memaksakan diri untuk membangun suatu objek wisata memerlukan daya dukung objek wisata tersebut rendah. Daya tarik salah satu objek wisata akan berkurang atau bahkan hilang saat wisata ini menyangkut keselamatan para wisatawan.

### 4) Layak Lingkungan

Analisis lingkungan dapat dipergunakan sebagai acuan kegintan pembangunan suatu objek wisata. Pembangunan objek wisata yang dibatalkan merusak lingkungan harus



dihentikan pembangunannya. Pengembangan objek wisata bermanfaat bagi lingkungan.

**f. Pendapatan Asli Daerah dalam Pariwisata**

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>73</sup> Adanya otonomi daerah diharapkan daerah dapat memainkan perannya dalam memajukan daerahnya dengan melakukan pengelolaan sumber-sumber yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa sumber-sumber penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi terdiri dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), Dana Perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah dan juga tentang hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang harus dilaksanakan secara adil dan selaras. Salah satu potensi yang dapat ditingkatkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) desa-desa di Indonesia adalah sektor

---

<sup>73</sup>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah

pariwisata. Berwisata di desa, dewasa ini telah menjadi pilihan tersendiri bagi wisatawan. Wisatawan menggemari tempat wisata di desa tidak hanya menyajikan keindahan alamnya saja tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat lokal. Berkembanglah alternatif pariwisata pada minat khusus dan lokasi tertentu yang disebut dengan desa wisata. Konsep desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.<sup>74</sup>

Sumber-sumber alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu unsur yang sangat mendukung bagi kelangsungan hidup dan merupakan faktor yang dapat meningkatkan kemakmuran bangsa. Sumber-sumber alam tersebut harus dikelola dengan baik, karena sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah adalah faktor utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan.<sup>75</sup> Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

- 1) Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

---

<sup>74</sup>Gamar Edwin, "Studi Tentang Pembentukan Desa Setulang Sebagai Desa Wisata", *Jurnal Pemerintahan Integratif*, No 1, Vol. 3 (April-Mei, 2011), 43.

<sup>75</sup> Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>76</sup> Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a) Pajak Provinsi, yang terdiri dari:

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- (4) Pajak Air Permukaan; dan
- (5) Pajak Rokok.

b) Jenis Pajak Kabupaten/kota terdiri atas:

- (1) Pajak Hotel;
- (2) Pajak Restoran;
- (3) Pajak Hiburan;
- (4) Pajak Reklame;
- (5) Pajak Penerangan Jalan;
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (7) Pajak Parkir
- (8) Pajak Air Tanah
- (9) Pajak Sarang Burung Walet
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

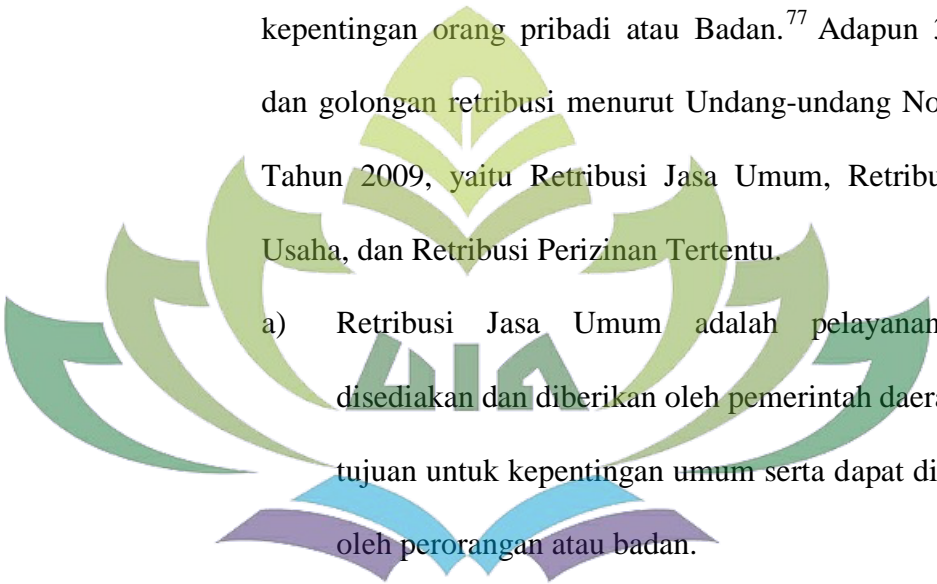
---

<sup>76</sup> Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2011 , (Jakarta : Mitra Wacana Media , 2011 ), h. 383.

(11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2) Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.<sup>77</sup> Adapun 3 objek dan golongan retribusi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

- 
- a) Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah yang tujuan untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh perorangan atau badan.
  - b) Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan atau badan.
  - c) Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang

---

<sup>77</sup> Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi ( Jakarta : Fokus Media , 2009 ) , h.4

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan atau badan.

## B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu merupakan acuan dan pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa peneliti terdahulu yang penulis temukan, terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata (studi di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)”* yang ditulis oleh Doni Apriadi, Jurusan Siyasah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018. Skripsi ini menyoroti tentang peranan dan kontribusi Pemerintah terhadap Pandapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan potensi wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat. Dimana Dinas Kebudayaan, Pariwisata sebagai SKPD yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan teknis, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan teknis, pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata, pengelolaan ketatausahaan Dinas, pelaksanaan tugas lain di bidang kebudayaan, pariwisata yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Metode yang digunakan penelitian ini adalah analisis

deskriptif kualitatif, yang berfokus pada pemerintah daerah yang berkewajiban.<sup>78</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Doni Apriadi adalah sama-sama membahas mengenai kontribusi Pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah dan metode yang dilakukan sama yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Doni Apriadi adalah penelitian Doni Apriadi berfokus pada kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi pariwisata, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan atau implementasi Pasal 17 Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Pariwisata dalam meningkatkan potensi wisata lokal. Penelitian Doni Apriadi mengkaji perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian ini mengkaji perspektif Fiqh Siyasah.

2. Skripsi yang berjudul *“Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Sistem Pengelolaan Pariwisata Laut (Studi di Kabupaten Pesisir Barat Lampung)”*, Yang ditulis oleh Miftahul Ulum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019. Skripsi ini menyoroti tentang sistem pengelolaan pariwisata laut di Kabupaten Pesisir Barat Lampung dimana dalam hal ini pemerintah masih berupaya merencanakan pengelolaan wisata pantai atau laut dengan melakukan kerja sama dengan Dinas Pariwisata.

---

<sup>78</sup> Doni Apriadi, *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata (studi di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)”*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).



Adapun yang telah dilakukan Dinas Pariwisata yaitu pembangunan *cottage* dan *stand* yang dapat digunakan sebagai tempat untuk masyarakat setempat menjajakanjualannya. Selain itu juga terdapat gedung serba guna, hal ini dimaksudkan sebagai tempat berkumpul dan tempat mengadakan acara besar di pesisir pantai. Namun pembangunan tersebut belum dibangun keseluruhan penjuru pantai di Pesisir Barat Lampung melainkan hanya pada tempat wisata yang diunggulkan saja, dalam hal ini yaitu Tanjung Setia tempat peselancar para wisatawan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang berfokus pada sistem yang digunakan pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata laut.<sup>79</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Miftahul Ulum adalah sama-sama membahas tentang dasar hukum yang digunakan dalam pariwisata, dan tujuan pariwisata menurut islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Miftahul Ulum adalah penelitian miftahul ulum berfokus pada sistem yang dilakukan pemerintah desa dalam pengelolaan pariwisata dilihat dari segi hukum islam dan hukum positif sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan atau implementasi Pasal 17 Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Pariwisata dalam meningkatkan potensi wisata lokal.

---

<sup>79</sup> Miftahul Ulum, “*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Sistem Pengelolaan Pariwisata Laut (Studi di Kabupaten Pesisir Barat Lampung)*”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

3. Skripsi yang berjudul *“Analisis Fiqh Siyāsah Tentang Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal”* yang ditulis oleh Muhammad Zainurroziqin, Jurusan Hukum Publik Islam, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019. Skripsi ini menyoroti tentang Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dijelaskan bahwa pada pasal 1 ayat (5) “ Kepala Desa atau di sebut dengannama lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa nya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Metode yang digunakan penelitian ini adalah analisis dekskriptif kualitatif, yang berfokus pada kewenangan pemerintah daerah yaitu kepala desa.<sup>80</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Zainurroziqin adalah sama-sama membahas kewenangan, tugas dan fungsi dari pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi wisata lokal dan sama-sama menggunakan analisis dekskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Zainurroziqin adalah penelitian Muhammad Zainurroziqin berfokus pada analisis fiqh siyasah tentang Kewenangan Kepala Desa dalam meningkatkan potensi wisata lokal, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan atau implementasi

---

<sup>80</sup> Muhammad Zainurroziqin, *“Analisis Fiqh Siyāsah Tentang Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal”* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2019).

Pasal 17 Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Pariwisata dalam meningkatkan potensi wisata lokal.

4. Skripsi yang berjudul *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan dalam Perspektif Hukum Islam”* yang ditulis oleh Rita Putri Andini, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini menyoroti tentang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan dalam Perspektif Hukum Islam dimana peraturan ini belum diterapkan secara maksimal, karena masih terbatasnya anggaran dana, akses menuju Lumbok Ranau Lampung Barat masih jauh dari pusat kota, dan banyaknya tempat pariwisata yang ada di Lumbok Ranau Lampung Barat. Metode yang digunakan penelitian ini adalah analisis dekskriptif kualitatif, yang berfokus pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan dalam Perspektif Hukum Islam.<sup>81</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rita Putri Andini adalah sama-sama membahas tentang peraturan yang membahas tentang kepariwisataan dan sama-sama menggunakan metode analisis kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rita Putri Andini adalah peraturan yang menjadi dasar penelitian. Dalam penelitian ini

---

<sup>81</sup> Rita Putri Andini, *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan dalam Perspektif Hukum Islam”*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

menggunakan Pasal 17 Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 49 Tahun 2016 sebagai sedangkan penelitian Rita Putri Andini menggunakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-farabi, Abu Nasr Muhammad bin Muhammad bin Tarkhan bin Unzlagh, *Ar-u Ahl al- Madînah al-Fadîlah*.
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Arikanto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV* ,Jakarta: Rineka Cipta
- , *Prosedur Penelitian*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahnya, Diponegoro, Bandung, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*, Damascus: Dar al-Qalam, 2007.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Edwin, Gamar. "Studi Tentang Pembentukan Desa Setulang Sebagai Desa Wisata", *Jurnal Pemerintahan Integrativ*, No 1, Vol. 3 (April-Mei, 2011
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM. 1983.
- Hasan, M.Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Galia Indonesia, 2002.
- HR, Ridwan. *Hukum Administari Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Imron, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Karya Ilmu, 1992.
- Jailani, Imam Amrusi, dkk.. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Kartono, Kartini. *Penghantar Metode Risert Sosial*, Cet Ke-7, Bandung: Mandar Maju, 1986.

- Katsir, Ibn, Imaduddin Abu al-Fida' Ismail, *Tafsir al-Qur'an al-Karim* Beirut: Dar Maktabah al-Hilal, 1986.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* Cet Ke-7, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Maryani,.. E. *Pengantar Geografi Pariwisata*. Bandung: Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS IKIP, 1991
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Narbuko, Cholid Abu Achmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Nugraha, Setya. Maulina, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karina.
- Pendit, Nyoman S, *Ilmu Pariwisata Sebuah Penghantar Perdana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999.
- *Ilmu Pariwisata Sebuah Penghantar Perdana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006.
- Poewadariminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* PN. Jakarta: balai pustaka, 1997.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta. 2013.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015.
- Suvena, I Ketut dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar, Bali: Pustaka Larasan, 2017.
- Taimiyah, Ibn. *al-Siyasah al-Syar'iyah fi ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyah*, Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, t.tp.



Wardiyanta, Metode Penelitian Pariwisata, Yogyakarta:cv.andi offset. 2006.

Yoeti, Oka A. *Penghantar ilmu pariwisata*, Bandung: angkassa, 1982.

-----. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: ANGKASA, 1996.

-----. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997

Zuldafrial dan Muhammad Lahir. *Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-2, Surakarta:Yuma Pustaka, 2012.

### **Jurnal**

Kamal, Nabila Safira, Ratna Herawati dan Amiek Soemarmi, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.2, 2016

Qotiha, Talitha Inas, Amiek Soemarmi, Budi Ispiyarso, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Meningkatkan Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No.2, 2017

Rusfi, Mohammad. “*Validasi Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*”, Jurnal Al-Adalah Vol.XII No.1.

Zaeny, A. *Pemimpin dalam Islam dan Pemikiran Politik Al-farabi*, Jurnal Tapis, Lampung : Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung,, Vol. 6 No.1. 2010

### **Undang-Undang**

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 *tentang Kepariwisataaan*

Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2011

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah

Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan

## **Wawancara**

Darwis, Wawancara dengan penulis, lokasi wisata curup gansa, Lampung 30 Juli 2020.

Dea, Wawancara dengan penulis, lokasi wisata curup putri malu, Lampung 30 Juli 2020.

Edwin Hendri, wawancara dengan penulis, Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Lampung, 06 Januari 2020.

Indra, Wawancara dengan penulis, lokasi kediaman pengelola, Lampung 30 Juli 2020.

M. Yazid Z, wawancara dengan penulis, Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Lampung, 28 Juli 2020.

Tuti Purwati, Wawancara dengan penulis, Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Lampung 28 Juli 2020

Yuli , Wawancara dengan penulis, lokasi wisata curup putri malu , Lampung 30 Juli 2020.

Yustian Umri Sangon, wawancara dengan penulis, Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Lampung, 06 Januari 2020.

Yustian Umri Sangon, wawancara dengan penulis, Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Lampung, 27 Juli 2020.

Yustian Umri Sangon, surat kepada penulis, Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Lampung, 27 Juli 2020.